

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Kencana.
- Ahmadi Miru, S. P. (2020). *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal - Pasal Perjanjian Bernama Dalam Kuh Perdata (Bw)*. . Sinar Grafika.
- Alvi Syahrin, (2023). *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik* (Maya Sari (ed.)). Sinar Grafika.
- Boy Nurdin. (t.t.). *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. PT Alumni.
- Dahlan. (2017). *Problematisa Keadilan* . CV BUDI UTAMA.
- Diana Rahmi. (2014). *Restrukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*. IAIN ANTASARI PRESS.
- H.Salle. (2018). *Uregensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. CV. Social politic Genius (SIGn).
- Lysa angaryni, Y. M. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Penaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Zaenab Ompu Jainah. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Pt Rajagrafindo Persada.

### B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan,Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

### C. SUMBER LAIN :

Amalia, R. F., Hukum, F., Balikpapan, U., Pupuk, J., Kelurahan, R., & Timur, K. (2020). *ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PUTUSAN No : 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp. 12, 57–73.*

Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>

Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 1(1), 13–21.

Hasanal Mulkam. (2021). Samudra Keadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 218–230.

Hasibuan, D. I., Kalo, S., & Ablisar, M. (2015). *DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA*. 3(1), 87–100.

Kiaking, C. J. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 6(1), 106–114.

Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>

- Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi., Wiyono, B. B., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). Penemuan Hukum. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Pratiwi, T. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan. *ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga*, 42–60.
- Riamor Bangun, Madiasa Ablisar, Mahmud Siregar, M. M. (2023). Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perantara Narkotika ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No . 1724 / PID . SUS / 2020 / PT . Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No . *jurnal Pencerah Bangsa*, 111, 59–66.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
- Tatumpe, A., Rumbay, C. O., & Waluko, J. J. (2022). *KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 364 / PID . SUS / 2022 / PN MND )*. 11, 30–39.
- Tessalonika Novela Pangaila. (2016). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Vestwansan Dipa Prasetya. (2020). *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol, VII No, I. (2020). 9. VII(I), 1–15.*
- Wijayanti Puspita Dewi. (2019). *PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*. 2, 55–73.